



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN PIMPINAN KOMISI IX DAN KOMISI X DALAM RANGKA  
MEMBAHAS USULAN PENAMBAHAN RUU DALAM  
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2015**

**TANGGAL 15 JUNI 2015**

---

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 10 (sepuluh).
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 15 Juni 2015.
Pukul	: 11.40 s/d 12.15 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Mendengarkan penjelasan dari Pimpinan Komisi IX dan Komisi X mengenai Usulan Penambahan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH., M.H..
Sekretaris	: Widiharto, SH.,MH.
Hadir	: - 24 orang, izin 15 orang dari 74 orang Anggota. - 1 orang Pimpinan Komisi X

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi IX dan Komisi X dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Pimpinan Komisi IX dan Komisi X mengenai usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pimpinan Komisi X untuk memberikan penjelasan mengenai usulan penambahan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dari Komisi X.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Pimpinan Badan Legislasi /Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Surat Pimpinan Komisi IX Nomor:LG/03130/DPR RI/II/2015, mengusulkan agar RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 atau Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan surat Pimpinan Komisi X Nomor: LG/07635/DPR RI/V/2015, mengusulkan RUU tentang Kebudayaan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, mengingat pada tahun 2015 baru ada 1 RUU usulan Komisi X yaitu RUU tentang Sistem Perbukuan, Badan Legislasi telah mengadakan rapat pada tanggal 11 Juni 2015 guna membahas evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
2. Dalam rangka menambah pengetahuan/informasi bagi Anggota Badan Legislasi mengenai *urgensi* diusulkannya RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU tentang Kebudayaan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015, Rapat hari ini diagendakan untuk mendengarkan penjelasan dari Pimpinan Komisi IX dan Pimpinan Komisi X.

B. Paparan/Penjelasan dari Pimpinan Komisi-Komisi, sebagai berikut :

B.1. Pimpinan Komisi IX  
(Tidak hadir)

B.2. Pimpinan Komisi X, memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada waktu pembahasan usul Prolegnas Tahun 2014-2019, Komisi X telah mengusulkan 3 (tiga) RUU untuk dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, namun hanya satu usulan RUU dari Komisi X yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yaitu RUU tentang Sistem Perbukuan.
2. Draft RUU dan Naskah Akademik RUU tentang Kebudayaan telah dirumuskan oleh Deputi Bidang Perundang-Undangan Setjen DPR RI dan dibahas dalam Panja oleh Anggota DPR RI Periode 2009-2014.
3. Berdasarkan Rapat Kerja antara Komisi X dengan Mendikbud RI pada tanggal 27 Januari 2015, Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membahas kembali RUU tentang Kebudayaan.
4. Dengan memperhatikan Pasal 107 ayat (6) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "Komisi dapat mengusulkan paling banyak 2 (dua) RUU dalam satu tahun", maka Komisi X mengusulkan RUU tentang Kebudayaan dapat dimasukkan dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
5. RUU tentang Kebudayaan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 antara lain karena keragaman budaya di Nusantara memerlukan perangkat pengaturan dan pengelolaan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin harmoni dan sinergi antarbudaya.
6. Perlu adanya landasan/dasar hukum untuk menyusun berbagai kebijakan, strategi, dan program pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kebudayaan bagi segenap pemangku kepentingan kebudayaan di Indonesia.
7. RUU tentang Kebudayaan merupakan amanat dari UUD NKRI Tahun 1945 yang bertujuan untuk memajukan kebudayaan nasional dengan berasaskan pada Bhineka Tunggal Ika, Kenusantaraan, Keadilan, dan Akulturasi.
8. Tujuan penyusunan RUU ini adalah untuk meneguhkan jati diri bangsa, membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan bangsa, dan meningkatkan citra bangsa.
9. RUU tentang Kebudayaan merupakan instrumen penting keberpihakan negara dari sisi politik anggaran terhadap pelestarian kebudayaan, sehingga Pemerintah mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat dalam melaksanakan pembangunan kebudayaan.

10. Komisi X akan segera menyampaikan Naskah Akademis dan draft RUU tentang Kebudayaan ke Badan Legislasi untuk dapat dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.
- C. Tanggapan Anggota terhadap usulan penambahan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 sebagai berikut :
1. Pengajuan RUU tentang Kebudayaan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 cukup diapresiasi karena memberikan nilai yang lebih baik pada nilai kebangsaan.
  2. Kebudayaan bangsa bersifat luas, bukan semata-mata produk-produk budaya, sehingga ruang lingkup kebudayaan dalam RUU tentang Kebudayaan harus diperjelas.
  3. Dengan adanya peristiwa “pengklaiman” budaya Indonesia oleh negara tetangga, maka RUU tentang Kebudayaan akan menjadi penjaga kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam.
  4. Mengingat luas dan beragamnya suku bangsa Indonesia yang melahirkan corak kebudayaan yang berbeda-beda, hendaknya RUU tentang Kebudayaan memiliki kejelasan materi mengenai apa yang akan diatur, sehingga tidak akan menimbulkan kekacauan dan ketidakteraturan.
  5. Untuk mengangkat citra Indonesia di mata dunia melalui kebudayaan, usulan RUU tentang Kebudayaan perlu didukung untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Komisi IX dan Komisi X dalam rangka pembahasan usulan penambahan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. RUU tentang Kebudayaan usulan Komisi X masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
2. Badan Legislasi akan mengundang Menkumham RI untuk menindaklanjuti hasil Rapat Badan Legislasi mengenai usulan penambahan RUU tentang Kebudayaan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
3. Untuk permohonan penambahan RUU yang berasal dari Komisi IX, akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, mengingat sudah ada 2 (dua) RUU usulan dari Komisi IX dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB

Jakarta, 15 Juni 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001